

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi pengelolaan kas pada Pemerintah Kabupaten Karo dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pengelolaan kas Pemerintah Kabupaten Karo melakukan perencanaan kas, penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan menggunakan aplikasi SIPD. Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karo dalam optimalisasi kas adalah menetapkan saldo kas minimal pada RKUD sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) dan menempatkan kelebihan kas dalam bentuk deposito.
2. Berdasarkan perhitungan kas optimal dengan metode Miller-Orr, jumlah kas optimal pada Pemerintah Kabupaten Karo adalah sebesar Rp8.307.243.119,29. Pengelolaan kas pada Pemerintah Kabupaten Karo belum sepenuhnya optimal karena jumlah kas riil pada neraca dengan jumlah kas optimal memiliki selisih yang besar. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak kas menganggur yang belum dioptimalkan.

3. Dalam pengelolaan kas pada Pemerintah Kabupaten Karo masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pengelolaan kas optimal pada Pemerintah Kabupaten Karo, antara lain kendala teknis penggunaan aplikasi SIPD yang belum sinkron dengan RKUD, keterlambatan penyerahan dokumen pendukung oleh SKPD yang menyebabkan penerimaan kas dan pengeluaran kas terhambat, dan perubahan regulasi mengenai rekening penempatan investasi jangka pendek sehingga optimalisasi kas dalam bentuk deposito belum dilakukan secara berkelanjutan.

4.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Karo menggunakan metode Miller-Orr dalam pengelolaan kas sehingga dapat menentukan batas bawah, batas atas, dan kas optimal dalam upaya menentukan jumlah kas yang akan dimanfaatkan dalam bentuk investasi jangka pendek apabila terjadi kelebihan kas atau melakukan peminjaman apabila terjadi kekurangan kas.
2. Pemerintah Kabupaten Karo mempercepat upaya sinkronisasi antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan *Cash Management System (CMS)* pada RKUD agar proses penerimaan kas dan pengeluaran kas dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Pemerintah Kabupaten Karo mendorong satuan pengawas intern (SPI) agar lebih aktif melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terkait pengelolaan kas yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).